

**PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER
SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF
ATAS TINDAKAN MEDIS BERISIKO TINGGI
PADA KASUS KEGAWATDARURATAN**

TESIS

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Guna mencapai gelar Magister Hukum**



OLEH :

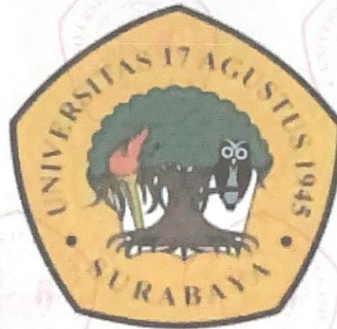
A K WISNU BAROTO S P
NPM : 1322200009

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER
SPECIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF
ATAS TINDAKAN MEDIS BERISIKO TINGGI
PADA KASUS KEGAWATDARURATAN**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Magister Hukum



Oleh :

A K Wisnu Baroto S P
NPM 1322200009

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER
SPECIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF
ATAS TINDAKAN MEDIS BERISIKO TINGGI
PADA KASUS KEGAWATDARURATAN



Oleh :

A K Wisnu Baroto S P
NPM 1322200009

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

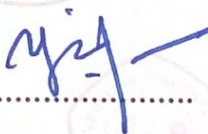
TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER
SPECIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF
ATAS TINDAKAN MEDIS BERISIKO TINGGI
PADA KASUS KEGAWATDARURATAN

Oleh :

A K Wisnu Baroto S P
NPM 1322200009

Telah disetujui Pembimbing :
Surabaya, 22 Desember 2023

Dr.Yovita Arie Mangesti, S.H.,M.H
Pembimbing I


.....

TESIS
**PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER
SPECIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF
ATAS TINDAKAN MEDIS BERISIKO TINGGI
PADA KASUS KEGAWATDARURATAN**

Diajukan oleh :

A K Wisnu Baroto S P
NPM 1322200009

Telah dipertahankan di Depan Penguji dan
Dinyatakan Lulus pada Ujian Tesis Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada tanggal : 12 Januari 2024

Tim Penguji

Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H
Ketua

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H
Anggota I

Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H
Anggota II



Mengesahkan,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr.AK Wisnu Baroto SP, MARS.,SpAn-TI.,Subsp TI(K).,FIP,
FISQua

NIM : 1322200009

Program : Magister Hukum
Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Tesis" saya dengan judul :

"PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF ATAS TINDAKAN MEDIS BERISIKO TINGGI PADA KASUS KEGAWATDARURATAN"

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apalagi ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 22 Desember 2023

Hormat saya,



dr.AK Wisnu Baroto SP, MARS.,SpAn-TI.,Subsp TI(K).,FIP.,FISQua



U N I V E R S I T A S
17 AGUSTUS 1945
S U R A B A Y A

BADAN PERPUSTAKAAN
JL. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TLP. 031 593 1800 (EX 311)
EMAIL: PERPUS@UNTAG-SBY.AC.ID.

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. AK Wisnu Baroto SP, MARS.,SpAn-TI.,subsp.TI(K)FIP,FISQua.
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Hukum
Jenis Karya : ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah~~

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya meyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF ATAS TINDAKAN MEDIS BERISIKO TINGGI PADA KASUS KEGAWATDARURATAN”

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 22 Desember 2023

Yang Menyatakan

10000
Rp
METERAI
TEMPEL
ED279ALX003186877

dr.AK Wisnu Baroto SP, MARS.,SpAn-TI.,Subsp TI(K).,FIP.,FISQua

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmatnya, maka penyusunan TESIS program Magister Ilmu Hukum yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF ATAS TINDAKAN MEDIS BERISIKO TINGGI PADA KASUS KEGAWATDARURATAN”** dapat terselesaikan sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum strata dua di Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.

Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat, memperluas wawasan pengetahuan terkait studi interdisipliner ilmu hukum dan ilmu kedokteran khususnya ilmu kedokteran kegawatdaruratan dan perawatan intensif yang merupakan salah satu bidang pelayanan medis dari dokter spesialis anesthesiologi dan terapi intensif.

Saya menghaturkan penghargaan dan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Dr.Yovita Arie Mangesti, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan segala bantuan, bimbingan, motivasi, dan doa dalam penyusunan tesis ini. Terima kasih atas segala hal yang telah mewarnai dan memberikan makna baru dalam kehidupan pembelajaran saya.
2. Prof.Dr.Slamet Suhartono, S.H.,M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah berkenan memberikan kesempatan bagi saya untuk menempuh pendidikan dan belajar tentang ilmu hukum .
3. Dr.Syofyan Hadi, S.H.,M.H sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas bimbingan, arahan serta ilmu yang diberikan selama menempuh pendidikan di Magister Ilmu Hukum.
4. Segenap bapak dan ibu dosen pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah berkenan mengajar, mendidik dan membagi keilmuan di bidang hukum
5. Seluruh bapak dan ibu tenaga kependidikan yang telah banyak membantu kelancaran studi saya di Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
6. Ibunda CTh Suprapti, istriku tersayang dr.Irma Lestari Paramastuty, SpA.,M.BioMed, anak-anak tercinta Bernadette Bellvania, Bernardus Rafael dan Bernardinus Mikhael yang telah memberikan doa, dukungan dalam segala hal sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Keluarga besar Group Dokter Spesialis Anesthesiologi dan Reanimasi Surabaya yang telah berkenan membantu berbagi beban pelayanan medis

8. Segenap direksi dan keluarga besar RSK St Vincentius a Paulo Surabaya yang telah memberikan saya kesempatan untuk belajar ilmu hukum
9. Seluruh teman-teman Magister Ilmu Hukum angkatan 48 yang telah berjuang bersama dalam perjalanan studi strata dua ini

Saya menyadari bahwa karya kecil ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu segala kritikan perbaikan dan saran yang bersifat membangun tetap sangat penulis harapkan.

Akhir kata, semoga karya ilmiah dalam bentuk tesis ini mempunyai manfaat bagi semua pihak yang berkenan membaca dan mempelajarinya.

Surabaya, 22 Desember 2023

Hormat saya,

dr.AK Wisnu Baroto SP, MARS.,SpAn-TI.,Subsp TI(K).,FIP.,FISQua

ABSTRACT

Anesthesiology and intensive care specialists often face situations requiring high-risk medical procedures in medical emergencies. However, most patients are unable to give consent for medical procedures due to their decreased consciousness. Article 293 paragraph (5) of the Health Law Number 17 of 2023 and Article 3 paragraph (1) of the Minister of Health Regulation Number 290/Menkes/Per/III/2008 on Medical Procedure Consent state that high-risk medical procedures must obtain written consent. The purpose of this study is to analyze the regulation and legal protection for anesthesiology and intensive care specialists in high-risk medical procedures during medical emergencies. Using legislative, conceptual, case, and historical approaches, this research concludes that there are various regulations related to the practice of anesthesiology and intensive care specialists in high-risk medical procedures during medical emergencies. These include Law Number 29 of 2004 on Medical Practice, Law Number 36 of 2009 on Health, and Law Number 44 of 2009 on Hospitals, which were replaced by Law Number 17 of 2023 on Health, Minister of Health Regulation Number 290/Menkes/Per/2008 on Medical Procedure Consent, Minister of Health Regulation Number 519/Menkes/Per/2011 on Guidelines for the Provision of Anesthesiology and Intensive Care Services in Hospitals, Minister of Health Regulation Number 19 of 2016 on Integrated Emergency Response Systems, and Minister of Health Regulation Number 47 of 2018 on Emergency Services. These legal products aim to protect doctors legally, providing clear guidelines focused on life-saving and the application of medical ethics.

Keywords: Anesthesiology and intensive care specialists; high-risk procedures; medical emergencies

ABSTRAK

Dokter spesialis anesthesiologi dan terapi intensif seringkali menghadapi situasi yang membutuhkan tindakan medis berisiko tinggi pada kasus kegawatdaruratan medis. Akan tetapi, kebanyakan pasien tidak dapat memberikan persetujuan tindakan medis karena mereka dalam kondisi penurunan kesadaran. Pasal 293 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran menyebutkan bahwa tindakan medis berisiko tinggi harus mendapatkan persetujuan tertulis. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaturan dan perlindungan hukum dokter spesialis anesthesiologi dan terapi intensif dalam hal tindakan medis berisiko tinggi pada kegawatdaruratan medis. Dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan historis, maka dalam penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat beragam peraturan yang berhubungan dengan praktik dokter spesialis anesthesiologi dan terapi intensif dalam hal tindakan medis berisiko tinggi pada kegawatdaruratan medis, yaitu UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang digantikan dengan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 519/Menkes/Per/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anesthesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan. Berbagai produk hukum tersebut guna perlindungan hukum dokter, memberikan pedoman tindakan yang jelas berfokus pada penyelamatan nyawa dan penerapan etika kedokteran.

Kata Kunci : dokter spesialis anesthesiologi dan terapi intensif ; tindakan berisiko tinggi; kegawatdaruratan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI DAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN ABSTRACT.....	ix
HALAMAN ABSTRAK.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
1.5 Orisinalitas Penelitian.....	8
1.5.1 Penelitian Terdahulu.....	8
1.5.2 Kajian Hasil Penelitian Terdahulu.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Jenis Penelitian.....	11
1.6.2 Pendekatan Masalah.....	11
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	12
1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	14
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	14
1.7 Pertanggungjawaban Sistematis.....	15
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP.....	17
2.1 Landasan Teori.....	17
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum.....	17
2.1.2 Teori Kepastian Hukum.....	29
2.1.3 Teori Keadilan.....	39
2.2 Penjelasan Konsep.....	45

2.2.1 Konsep Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif.....	45
2.2.2 Konsep Kegawatdaruratan.....	49
2.2.3 Konsep Tindakan Medis Berisiko Tinggi.....	53
BAB III PEMBAHASAN.....	57
3.1 Pengaturan Tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Dalam Hal Tindakan Medis Berisiko Tinggi Pada Kegawatdaruratan Medis	57
3.1.1 Aturan Tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Dalam Hal Tindakan Medis Berisiko Tinggi Pada Kegawatdaruratan Medis	57
3.1.2 Implikasi Aturan Tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Dalam Hal Tindakan Medis Berisiko Tinggi Pada Kegawatdaruratan Medis	79
3.1.2.1 Analisis Aturan Tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Dalam Hal Tindakan Medis Berisiko Tinggi Pada Kegawatdaruratan Medis.....	79
3.1.2.2 Analisis Kasus Dugaan Malpraktik Kematian Anak DC Dalam Perspektif Kepastian Hukum.....	84
3.1.2.3 Analisis Malpraktik Kematian Anak FRB Dalam Perspektif Keadilan	88
3.2 Perlindungan Hukum Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Dalam Hal Tindakan Medis Berisiko Tinggi Pada Kegawatdaruratan Medis.....	93
3.2.1 Praktik Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Dalam Tindakan Medis Berisiko Tinggi Pada Kegawatdaruratan Medis Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum.....	93
3.2.2 Implikasi Asas-Asas Hukum Sebagai Dasar Perlindungan Hukum Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Dalam Tindakan Medis Berisiko Tinggi Pada Kegawatdaruratan Medis	102
3.2.3 <i>Presumed Consent</i> Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Dalam Tindakan Medis Berisiko Tinggi Pada Kegawatdaruratan Medis	105
3.2.4 Perlindungan Hukum Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Dalam Tindakan Medis Berisiko Tinggi Pada Kegawatdaruratan Medis Yang Berkeadilan	122

BAB IV PENUTUP	135
4.1 Kesimpulan	135
4.2 Saran.....	135
 DAFTAR PUSTAKA.....	 137